

Implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya

Alda Dewi Weston¹, Indah Prabawati², Suci Megawati³, Tauran⁴

¹⁻⁴Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Ilmu Administrasi Negara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords

Policy Implementation, Education, Tangguh Youth Scholarship.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Youth Resilience Scholarship Program using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn. This research employed a qualitative method with a descriptive design. The research was conducted at SMK Negeri 12 Surabaya. Informants were selected purposively and included the Vice Principal for Student Affairs, officials from the Governance and Public Welfare Division (Bapemkesra) of the Surabaya City Government, the school program coordinator, and scholarship recipient students. Data were collected through interviews, observation, and documentation using interview guides, observation guides, and documentation as research instruments. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results indicate that the implementation of the Youth Resilience Scholarship Program has generally been carried out quite well. The variables of policy standards and objectives, inter-organizational communication and enforcement activities, economic, social, and political conditions, as well as the disposition of implementers, were categorized as good. Meanwhile, the variables of resources and the characteristics of

implementing agencies have not been fully optimal due to limitations in human resources, technical issues in the reporting system, and the lack of integrated access to scholarship recipient data between the government and schools. It can be concluded that the program has contributed to supporting students' educational continuity; however, improvements are still

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Lokasi penelitian berada di SMK Negeri 12 Surabaya. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, pihak Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, penanggung jawab program di sekolah, serta siswa penerima beasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh secara umum telah berjalan cukup baik. Variabel standar dan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap para pelaksana tergolong baik. Sementara itu, variabel sumber daya dan karakteristik lembaga pelaksana belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem pelaporan, serta belum terintegrasinya akses data penerima beasiswa antara pemerintah dan sekolah. Disimpulkan bahwa program telah mendukung keberlanjutan pendidikan siswa, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, disarankan adanya integrasi sistem informasi, optimalisasi layanan pelaporan digital, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima beasiswa.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan berperan penting dalam mengasah kemampuan dan keterampilan individu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tepat (Adam *et al.*, 2022). Menurut John Dewey pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional, dalam hubungan manusia

dengan lingkungan dan sesamanya Asfar *et al.*, 2020). Meskipun memiliki peran yang sangat penting, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat keberlanjutan pendidikan anak dan meningkatkan risiko putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai daerah berupaya menghadirkan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023-2025. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1 Data Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2023-2025

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2023	10,70	14,85
2024	10,89	14,87
2025	11,15	14,88

Sumber: Sumber: bps.go.id, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2025, RLS penduduk Kota Surabaya mencapai 11,15 tahun dan HLS sebesar 14,88 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2026). Meskipun demikian, angka putus sekolah pada jenjang SMK/MAK di Kota Surabaya masih ditemukan pada tahun 2025 baik pada sekolah negeri maupun swasta, dengan total 107 peserta didik tercatat putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah masih menjadi tantangan di Kota Surabaya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Surabaya dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025, khususnya misi untuk mempercepat transformasi penciptaan sumber daya manusia unggul dan berkarakter (Pemkot Surabaya, 2025). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan biaya pendidikan agar peserta didik tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi dan terbukti meningkatkan motivasi siswa belajar penerima karena memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik (Firdaus & Widiyarta, 2024).

Pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang SMA/SMK/MA sederajat di Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait kepatuhan pelaporan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Perbandingan jumlah siswa penerima beasiswa yang belum melakukan pelaporan pada beberapa sekolah di Kota Surabaya periode Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Perbandingan Antar Sekolah yang Siswanya Belum Lapor Periode Bulan Desember Tahun 2025

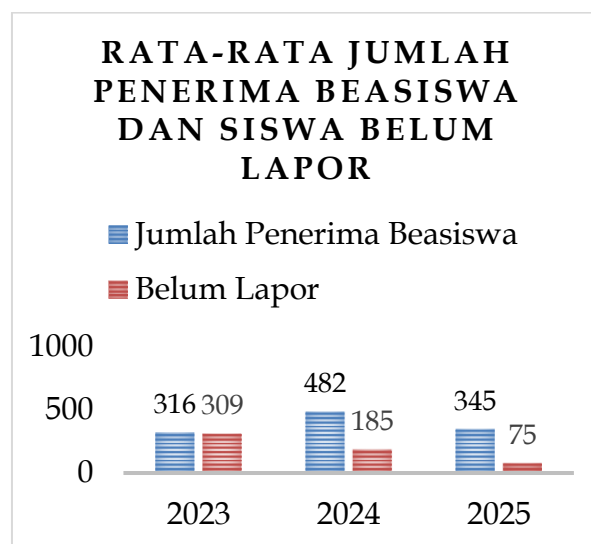
Nama Sekolah	Jumlah Penerima Beasiswa	Belum Lapor
SMKN 12 Surabaya	345	68
SMKN 10 Surabaya	419	63

SMKN 2 Surabaya	620	60
SMKN 5 Surabaya	486	59
SMKN 6 Surabaya	412	58

Sumber: pemudatangguh.surabaya.go.id/opd, 2025

Berdasarkan data tersebut, SMK Negeri 12 Surabaya menjadi sekolah dengan jumlah siswa belum melapor tertinggi, yaitu sebanyak 68 siswa dari total 345 penerima beasiswa. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan SMKN 10 Surabaya sebanyak 63 siswa, SMKN 2 Surabaya sebanyak 60 siswa, SMKN 5 Surabaya sebanyak 59 siswa, dan SMKN 6 Surabaya sebanyak 58 siswa (Pemuda Tangguh, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan administratif penerima beasiswa masih menjadi tantangan dalam implementasi program.

Data rata-rata jumlah penerima Beasiswa Pemuda Tangguh dan siswa yang belum melakukan pelaporan di SMK Negeri 12 Surabaya periode 2023–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Rata-rata Jumlah Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh dan Siswa Belum Lapor di SMK Negeri 12 Surabaya Tahun 2023-2025

Sumber: pemudatangguh.surabaya.go.id/opd, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima beasiswa meningkat dari 316 siswa pada tahun 2023 menjadi 482 siswa pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 345 siswa pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah siswa yang belum melapor mengalami penurunan dari 309 siswa pada tahun 2023 menjadi 75 siswa pada tahun 2025 (Pemuda Tangguh, 2025). Meskipun demikian, pelaporan rutin KBM masih menjadi kendala yang dihadapi sekolah.

Penelitian terdahulu mengenai Program Beasiswa Pemuda Tangguh umumnya berfokus pada jenjang perguruan tinggi dan menunjukkan bahwa program tersebut mampu meringankan beban biaya pendidikan penerima dari keluarga kurang mampu, meskipun masih menghadapi kendala seperti kewajiban pelaporan rutin dan keterbatasan anggaran (Firdaus & Widiyarta, 2024; Mariane & Rahaju, 2025). Namun, penelitian mengenai implementasi program pada jenjang pendidikan menengah, khususnya SMK, masih terbatas, terutama terkait peran sekolah dalam sosialisasi, pendampingan pelaporan, dan pemantauan kepatuhan penerima beasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Permatasari, 2020). Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Ibrahim, 2024). Kedua definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan spontan, melainkan tindakan yang disengaja dan dirancang secara sistematis untuk memberikan solusi terhadap isu publik yang dihadapi. Suatu kebijakan disusun melalui serangkaian proses mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda, forecasting, adopsi, implementasi, penilaian, dan adaptasi kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif (Dunn dalam Igrisa, 2022).

Pengukuran keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan program dengan melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua menilai apakah tujuan program tersebut tercapai (Grindle dalam Agustino, 2022). Artinya, untuk mengetahui apakah suatu program dapat dinyatakan berhasil atau gagal perlu melihat bagaimana implementasinya di lapangan.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan program atau kebijakan yang mengubah rencana menjadi tindakan nyata (Howlett & Ramesh dalam Agustino, 2022). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan (Agustino, 2022).

Model Implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation Process*. Model ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen utama yang menjadi fokus, tetapi juga memperjelas hubungan di antara variabel-variabel independen tersebut. Terdapat enam enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja:

1. Standar dan Tujuan

Variabel ini berkenaan dengan kejelasan ukuran keberhasilan dan tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan program.

2. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Penegakan

Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan berkenaan dengan proses penyampaian informasi, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta mekanisme pengawasan dan penegakan aturan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana berkenaan dengan kondisi internal organisasi pelaksana, seperti struktur organisasi, kompetensi pelaksana, pola hubungan kerja, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik berkenaan dengan faktor lingkungan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat proses implementasi kebijakan seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, karakteristik sosial masyarakat, opini publik, dukungan elite politik, dinamika partai politik, serta keterlibatan kelompok kepentingan.

6. Ketepatan

Sikap para pelaksana berkenaan dengan tingkat pemahaman, penerimaan, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya. Fokus penelitian menggunakan model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap para pelaksana.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Observasi lapangan dilakukan pada saat kegiatan pendaftaran, seleksi, dan penyaluran beasiswa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian terkait pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, pemanfaatan bantuan, dan pemenuhan kewajiban sebagai penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, data statistik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas Pejabat Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program beasiswa, guru atau kepala sekolah di SMK Negeri 12 Surabaya, serta para penerima beasiswa Pemuda Tangguh.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haq, 2023). Data yang diperoleh kemudian diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian berdasarkan indikator Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi pendukung untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah mengenai Implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya di SMK Negeri 12 Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Beasiswa Pemuda Tangguh merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang diselenggarakan melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Program ini hadir sebagai upaya mengurangi beban biaya pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta menjamin keberlangsungan studi pelajar hingga lulus tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022, sasaran penerima beasiswa jenjang SMA/SMK/MA sederajat Negeri maupun Swasta adalah pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. Jenis bantuan yang diberikan meliputi bantuan biaya pendidikan sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, kaos kaki, dan sepatu yang diberikan setiap tahun ajaran baru. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kejelasan bentuk dan mekanisme bantuan yang diterima penerima beasiswa.

Pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya sejak awal

implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana implementasi program telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel berikut:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan harus memiliki kejelasan standar dan sasaran serta dapat diukur, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai implementasi kebijakan (Subarsono, 2023). Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan standar dan tujuan kebijakan sebagai tolok ukur kinerja dari kebijakan yang diimplementasikan, apakah realistis atau justru terlalu idealis untuk diterapkan.

Tujuan Program Beasiswa Pemuda Tangguh telah dirumuskan secara jelas dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 yaitu menjamin keberlangsungan pendidikan siswa hingga lulus tepat waktu serta menekan angka putus sekolah. Tujuan tersebut disertai dengan kewajiban bagi penerima beasiswa untuk melaporkan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai ketentuan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya angka keberlangsungan studi dan rendahnya angka putus sekolah penerima beasiswa di SMK Negeri 12 Surabaya yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh bisa mempertahankan masa studinya setiap tahun. dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Keberlangsungan Studi Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya.

Tahun	Lulus	Pindah Sekolah	Putus Sekolah
2023	100	3	0
2024	130	5	2
2025	120	6	0

Sumber: Diolah peneliti dari Bapemkesra, 2026

Standar implementasi program diwujudkan melalui kewajiban pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), keberlangsungan studi, kenaikan kelas, dan kelulusan penerima beasiswa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat keterlambatan pelaporan KBM juga mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang menunjukkan meningkatnya kepatuhan penerima terhadap kewajiban program. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Data Keterlambatan Pelaporan KBM.

Tahun	Persentase Keterlambatan
2024	38,2%
2025	21,6%

Sumber: Diolah peneliti dari Bapemkesra, 2026

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat keterlambatan pelaporan KBM mengalami penurunan signifikan dari tahun 2024-2025. Siswa yang belum melapor setiap bulan di tahun 2024 sebesar 38,2%, sedangkan tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 21,6%. Mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah bersama Bapemkesra melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaporan kegiatan belajar mengajar penerima beasiswa UNTUK memastikan tujuan program tetap tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono

(2023) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan memperbaiki berbagai kekurangan yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

Capaian tujuan program juga diperkuat oleh peningkatan rata-rata nilai akademik serta tingginya persentase kenaikan kelas dan kelulusan penerima beasiswa sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Data Akademik Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh.

Tahun	Rata-Rata Nilai Akade- mik	Persentase Kenaikan Kelas
2023	83,5	98%
2024	84,2	97%
2025	85,1	99%

Sumber: Diolah peneliti dari Bapemkesra, 2026

Data tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata nilai akademik penerima beasiswa pemuda tangguh di SMK Negeri 12 Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025. Persentase kenaikan kelas juga berada di angka yang relatif tinggi dan stabil, bahkan mencapai 99% di tahun 2025.

Peningkatan rata-rata nilai akademik dapat dipandang sebagai dampak tambahan dari implementasi program. Bantuan pendidikan yang diberikan dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga siswa bisa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa dukungan finansial melalui program bantuan pendidikan dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa karena berkurangnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana dan penerima manfaat, meskipun masih ditemukan keterlambatan pelaporan akibat kendala teknis dan kurangnya pemahaman sebagian siswa.

Sumber Daya

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi elemen penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, serta sistem digital yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan program secara efektif serta mengurangi risiko kegagalan implementasi (Subarsono, 2023).

Pelaksanaan program ditingkat sekolah melibatkan staf kesiswaan yang bertugas melakukan pendampingan dan pemantauan pelaporan siswa. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa pada pasal 7 ayat (4), tim seleksi calon penerima beasiswa bagi pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi, terdiri dari unsur: 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Sosial; 3) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 4) Tenaga Ahli/Instansi terkait. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) bertugas sebagai tim seleksi yang menangani seleksi administrasi dan verifikasi laporan penerima beasiswa dari berbagai sekolah jenjang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Surabaya.

Dari sisi anggaran, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp200.000 per bulan serta bantuan seragam sekolah bagi penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Suryadi (2020), dukungan pendanaan yang memadai merupakan salah

satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan karena program pendidikan membutuhkan sumber daya finansial yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, penggunaan sistem berbasis digital melalui website Pemuda Tangguh membantu proses pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah staf sekolah, perangkapan tugas guru, serta keterbatasan perangkat dan akses internet yang dimiliki sebagian siswa serta belum optimalnya sistem pemantauan yang ditunjukkan oleh adanya keterlambatan pelaporan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan biaya pendidikan akibat kurangnya pemahaman penerima beasiswa terkait mekanisme pelaporan KBM, menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal hingga 100%. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelompok sasaran dalam memahami serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan dalam kebijakan tersebut.

Komunikasi Antarorganisasi Dan Kegiatan Penegakan

Komunikasi antar organisasi serta aktivitas para pelaksana merupakan jalur utama dalam penyampaian instruksi, klarifikasi kebijakan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Komunikasi dalam implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh dilakukan antara Bapemkesra, Sekretariat Daerah, dan pihak sekolah melalui rapat koordinasi serta media digital seperti WhatsApp dan Telegram. Mekanisme komunikasi ini mempermudah penyampaian informasi terkait perubahan kebijakan maupun kendala pelaksanaan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antar organisasi pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena mampu memastikan informasi kebijakan tersampaikan secara jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi telah berjalan cukup baik, meskipun sekolah masih memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi status pelaporan siswa secara real time. Pihak sekolah berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada siswa terkait mekanisme pelaporan, mengingatkan jadwal pelaporan, serta membantu siswa ketika mengalami kendala teknis dalam sistem pelaporan daring. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena kelompok sasaran merasa mendapatkan pendampingan dalam menjalankan kewajiban program.

Dari sisi penegakan aturan, penerima yang tidak melakukan pelaporan selama tiga bulan berturut-turut dapat dinonaktifkan dari program setelah melalui tahapan teguran dan peringatan. Selain penegakan aturan, pelaksana juga menerapkan pendekatan pembinaan melalui pengingat dan pendampingan kepada siswa. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) mekanisme penegakan yang konsisten disertai komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan lebih mudah tercapai.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga pelaksana dalam Program Beasiswa Pemuda Tangguh ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara Bapemkesra sebagai pengelola program dan pihak sekolah sebagai pendamping serta pengawas pelaksanaan di tingkat lapangan.

Bapemkesra bertanggung jawab terhadap seleksi, verifikasi, dan pencairan bantuan, sedangkan sekolah bertugas melakukan pendampingan, pengawasan pelaporan, serta pembaruan data siswa penerima. Pembagian kewenangan tersebut mendukung kelancaran implementasi program dan meminimalkan tumpang tindih tugas. Meskipun demikian, keterbatasan akses sekolah terhadap data penerima menyebabkan fungsi monitoring belum dapat dilakukan secara optimal sehingga diperlukan integrasi sistem informasi antar lembaga.

Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Kondisi lingkungan eksternal perlu diperhatikan karena dapat menentukan tingkat relevansi kebijakan terhadap kebutuhan kelompok sasaran serta memengaruhi dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan (Van Meter dan Van Horn, 1975). Program Beasiswa Pemuda Tangguh dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingginya risiko putus sekolah akibat keterbatasan biaya pendidikan. Kondisi tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota Surabaya untuk menghadirkan program beasiswa sebagai bentuk perlindungan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Data kemiskinan Kota Surabaya menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 2021–2025, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Data tersebut dapat dilihat pada

Tabel 6 Data Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2021	152,49	5,23
2022	138,21	4,72
2023	136,37	4,65
2024	116,62	3,96
2025	105,09	3,56

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Sosial

Jumlah penduduk miskin berada pada kisaran ratusan ribu jiwa, kondisi ini memperlihatkan bahwa Kota Surabaya mengalami kerentanan ekonomi secara realita sosial. Penurunan persentase kemiskinan, tidak menghilangkan risiko ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Utamanya bagi kelompok masyarakat dengan pekerjaan sektor informal dan pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan ekonomi memengaruhi keberlangsungan pendidikan siswa di tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, dukungan keluarga dan lingkungan pergaulan juga memengaruhi kedisiplinan siswa dalam melakukan pelaporan. Sementara itu, dukungan politik Pemerintah Kota Surabaya terlihat melalui keberlanjutan penganggaran program setiap tahun.

Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi meliputi tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, sikap penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan, serta kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Bapemkesra dan pihak sekolah memandang program ini sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang

mampu.

Pelaksana menerapkan pendekatan persuasif melalui pendampingan dan pengingat kepada siswa, namun tetap menjalankan penegakan aturan sesuai ketentuan program. Bentuk penindakan terhadap pelanggaran pelaporan dilakukan secara bertahap mulai dari teguran, peringatan, hingga penonaktifan bantuan sesuai tingkat pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga akuntabilitas serta ketepatan sasaran program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implementasi program menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap para pelaksana menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Pada variabel standar dan tujuan kebijakan, Program Beasiswa Pemuda Tangguh mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Program ini telah mampu mendukung tujuan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjamin keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu dan menekan angka putus sekolah. Pada variabel sumber daya, implementasi program telah didukung oleh anggaran pemerintah, sistem pelaporan digital, serta dukungan tenaga pendidik. Akan tetapi, keterbatasan jumlah staf pendamping, keterbatasan perangkat pendukung pelaporan, serta rendahnya pemahaman sebagian siswa terhadap mekanisme pelaporan menyebabkan proses monitoring dan pendampingan belum berjalan secara optimal.

Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan, koordinasi antara Bapemkesra dan pihak sekolah telah berjalan cukup baik melalui komunikasi berjenjang dan pemanfaatan media digital. Selain itu, penerapan teguran hingga penghentian bantuan bagi siswa yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan turut mendukung kepatuhan penerima beasiswa. Pada variabel karakteristik lembaga pelaksana, pembagian tugas dan kewenangan antar pelaksana telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum terintegrasinya akses data penerima beasiswa antara pemerintah dan sekolah menyebabkan fungsi pengawasan dan pendampingan belum berjalan secara maksimal.

Pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik, implementasi program memperoleh dukungan dari kebutuhan masyarakat, lingkungan sosial, serta komitmen Pemerintah Kota Surabaya melalui regulasi dan penganggaran program secara berkelanjutan. Namun demikian, kondisi ekonomi sebagian keluarga penerima dan keterbatasan fasilitas pendukung pelaporan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, pada variabel sikap para pelaksana, pihak Bapemkesra dan sekolah menunjukkan komitmen serta dukungan yang tinggi terhadap keberhasilan program. Akan tetapi, masih terdapat sebagian siswa yang menunda pelaporan akibat kelalaian, lupa, maupun kurangnya manajemen waktu.

REFERENSI

- Adam, D., Olilingo, F.Z., & Santoso, I.R. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(1): 97-111.
- Asfar, A.M.I.T., Asfar, A.M.I.A., Asfar, A.H., & Kurnia, A. (2020). Landasan Pendidikan: Hakikat Dan

- Tujuan Pendidikan (Foundation of Education: Essence And Educational Objectives). DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22158.10566>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2023-2025. URL: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-metode-baru--harapan-lama-sekolah--tahun-.html> . Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2023-2025. URL: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru--rata-rata-lama-sekolah--tahun-.html> . Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, D.A.P., & Widiyarta, A. (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh Dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Publicuho*. 7(4): 2309-2318.
- Ibrahim. (2024). Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: K-Media.
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Marine, W., & Rahaju, T. (2025). Implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. 5(1): 13-21.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. JDIH Pemerintah Kota Surabaya. URL: <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4265> .
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Untuk Mahasiswa 2025. URL: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/24148/pemkot-surabaya-buka-pendaftaran-beasiswa-pemuda-tangguh-untuk-mahasiswa-2025> . Diakses pada tanggal 25 September 2025.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). Visi Misi Kota Surabaya. URL: <https://www.surabaya.go.id/id/page/0/60539/visi-misi-kota-surabaya> . Diakses pada tanggal 20 September 2025.
- Pemuda Tangguh. (2025). Daftar Sekolah Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh Periode Tahun 2025. URL: <https://pemudatangguh.surabaya.go.id/opd> . Diakses pada tanggal 29 September – 25 November 2025.
- Pemuda Tangguh. (2025). Persyaratan, Berkas, dan *Timeline* Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. URL: <https://pemudatangguh.surabaya.go.id/> . Diakses pada tanggal 25 September 2025.
- Pemuda Tangguh. (2026). Persyaratan Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. URL: <https://pemudatangguh.surabaya.go.id/> . Diakses pada tanggal 24 Februari 2026.
- Permatasari, P., Iلمان, A.S., Tilt, C.A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R.H., Rahman, A.B., Samosir, A.P., & Wardhana, I.W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Journal Sustainability*. 13(21): 1-30.
- Subarsono, A. G. (2023). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*. 6(4): 445-488.

